

DARI KARTINI KE POSTMODERNISME: EVOLUSI PEMIKIRAN FEMINISME

Dini Yuliani

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : dini23010@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi evolusi pemikiran feminisme dari Raden Ajeng Kartini hingga feminisme postmodern, menyoroti bagaimana kedua pendekatan ini berkontribusi pada perjuangan hak-hak perempuan. Kartini, sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sebagai jalan menuju kebebasan dan kesetaraan gender. Sementara itu, feminisme postmodern, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Judith Butler, memperkenalkan konsep dekonstruksi dan pluralitas identitas, menantang metanarasi dan memperluas pemahaman tentang kompleksitas pengalaman perempuan. Artikel ini membandingkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pemikiran Kartini dengan inovasi dari feminisme postmodern, serta mengkaji implikasinya bagi gerakan feminisme masa kini. Hasil analisis menunjukkan bahwa menggabungkan pendekatan praktis Kartini dengan wawasan teoretis postmodernisme dapat menciptakan gerakan feminisme yang lebih inklusif, relevan, dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Kata Kunci : Kartini, Postmodernisme, Feminisme

ABSTRACT

This article explores the evolution of feminist thought from Raden Ajeng Kartini to postmodern feminism, highlighting how both approaches have contributed to the struggle for women's rights. Kartini, as a pioneer of women's emancipation in Indonesia, emphasized the importance of education and economic empowerment as a path to freedom and gender equality. Meanwhile, postmodern feminism, represented by figures such as Judith Butler, introduced the concepts of deconstruction and plurality of identities, challenging metanarratives and expanding understanding of the complexity of women's experiences. This article compares and integrates the principles of Kartini's thought with innovations from postmodern feminism, and examines their implications for the contemporary feminist movement. The results of the analysis show that combining Kartini's practical approach with the theoretical insights of postmodernism can create a more inclusive, relevant, and effective feminist movement in facing contemporary challenges.

Keywords : Kartini, Postmodernism, Feminism

A. PENDAHULUAN

Feminisme dan postmodernisme adalah dua aliran pemikiran yang kerap menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan aktivis. Feminisme dan postmodernisme merupakan dua aliran pemikiran yang berbeda, tetapi mereka sering saling beririsan dalam analisis sosial dan budaya.

Feminisme, secara umum, adalah gerakan yang berfokus pada perjuangan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pemikiran feminis mengkritisi struktur patriarkal dan menuntut perubahan sosial untuk mencapai kesetaraan. Di sisi lain, postmodernisme adalah pendekatan intelektual yang menolak narasi besar dan universalitas, serta menekankan pluralitas, relativisme, dan dekonstruksi terhadap berbagai struktur sosial dan budaya yang dianggap tetap dan baku.

Meskipun berbeda dalam fokus utama mereka, feminisme dan postmodernisme dapat berintegrasi dalam konteks analisis kritis. Postmodernisme menawarkan alat konseptual yang berguna bagi feminisme untuk mendekonstruksi norma-norma gender dan hierarki kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti Judith Butler, misalnya, menggabungkan pendekatan feminis dengan teori postmodern untuk menunjukkan bahwa gender adalah performatif dan terbentuk melalui praktik sosial yang berulang. Dengan demikian, postmodernisme membantu feminisme untuk lebih fleksibel dalam memahami identitas gender dan mengkritisi esensialisme gender yang kaku.

Namun, ada juga ketegangan antara kedua pemikiran ini. Beberapa feminis mengkritik postmodernisme karena relativismenya yang dapat melemahkan

klaim politik feminis tentang ketidakadilan dan penindasan. Sebaliknya, postmodernis menganggap beberapa pendekatan feminis sebagai terlalu dogmatis dan kurang sensitif terhadap kompleksitas identitas individu. Meskipun demikian, kolaborasi antara feminisme dan postmodernisme dapat memperkaya kedua bidang ini, membuka ruang untuk analisis yang lebih mendalam dan inklusif terhadap berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Raden Ajeng Kartini menawarkan perspektif yang unik dan relevan untuk memahami kedua konsep ini. Sebagai tokoh emansipasi perempuan, Kartini tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita, tetapi juga menggugat struktur sosial yang patriarkal. Dengan memadukan pemikiran feminis Kartini dengan pendekatan postmodernisme, kita dapat menggali bagaimana kritiknya terhadap penindasan gender dan hierarki sosial masih relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern ini. Artikel ini akan membahas kontribusi Kartini terhadap wacana feminisme dan bagaimana gagasan-gagasannya dapat diterapkan dalam kerangka postmodernisme, membuka jalan untuk pemahaman yang lebih kompleks dan menyeluruh tentang perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan historis, yang bertujuan untuk menelusuri perkembangan pemikiran dan peran perempuan dalam masyarakat dari masa ke masa. Pendekatan ini menyoroti bagaimana gagasan emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini pada awal abad ke-20 berkembang dan mengalami perubahan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan

budaya hingga era postmodernisme. Dengan menggunakan pendekatan historis, artikel ini akan menganalisis dinamika perubahan ide dan praktik dalam perjuangan perempuan, mulai dari tuntutan pendidikan dan hak-hak dasar pada masa Kartini, hingga pergeseran paradigma dalam era postmodernisme yang lebih menekankan pluralitas, dekonstruksi identitas gender, serta kritik terhadap narasi besar. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bagaimana evolusi konsep feminisme dan emansipasi perempuan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lokal, tetapi juga oleh arus pemikiran global yang terus berkembang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme telah mengalami evolusi yang signifikan sejak kemunculannya, melintasi berbagai era dan konteks budaya. Di Indonesia, Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh sentral dalam sejarah feminisme, yang gagasan-gagasannya tentang pemberdayaan perempuan dan pendidikan masih relevan hingga kini. Sementara itu, feminisme postmodern menawarkan pendekatan yang lebih teoretis dan dekonstruktif dalam memahami identitas dan kekuasaan.

Raden Ajeng Kartini (1879-1904) dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Dalam surat-suratnya, yang kemudian dibukukan dalam "Habis Gelap Terbitlah Terang," Kartini mengkritik keras sistem patriarki yang mengekang perempuan, khususnya dalam akses terhadap pendidikan. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk

mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, melihat pendidikan sebagai jalan untuk kebebasan dan pemberdayaan. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk mengangkat status sosial perempuan dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat.

Pemikiran feminisme Raden Ajeng Kartini berakar pada konteks sosial dan budaya Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kartini mengadvokasi pendidikan dan kesetaraan hak bagi perempuan, menyoroti ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam sistem patriarkal feodal. Kartini mengkritik keras praktik-praktik adat yang mengekang kebebasan perempuan, seperti pernikahan paksa dan pembatasan akses terhadap pendidikan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk emansipasi perempuan, memberikan mereka pengetahuan dan kekuatan untuk menentukan nasib sendiri.

Kegelisahan Kartini mengenai ketidakberdayaan perempuan Jawa, terutama dari kalangan ningrat, tercermin dalam pandangannya tentang perkawinan. Menurut Kartini, satu-satunya jalan yang terbuka bagi gadis Jawa pada zamannya adalah perkawinan, yang seharusnya menjadi tujuan tertinggi dan panggilan suci bagi wanita. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan sering kali berubah menjadi semacam jabatan yang harus dijalani dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan martabat perempuan. Gadis-gadis dipaksa menikah atas perintah ayah, paman, atau kakaknya, dengan laki-laki yang tidak mereka kenal, dan sering kali laki-laki tersebut sudah memiliki istri dan anak-anak. Kartini menyoroti bahwa pendapat perempuan dalam hal ini tidak

pernah dipertimbangkan; mereka harus menurut tanpa bisa menolak. Hal ini mencerminkan betapa perempuan tidak memiliki otonomi atas kehidupan mereka sendiri, dan bagaimana adat istiadat dan norma-norma sosial yang patriarkal membelenggu kebebasan dan hak-hak mereka. Kartini mengungkapkan keresahan mendalam terhadap ketidakadilan ini dalam suratnya kepada Nyonya Van Kol pada 19 Agustus 1901.

Sebagai perbandingan, Simone de Beauvoir, seorang feminis Prancis terkenal, dalam bukunya "The Second Sex" (1949), menekankan konsep bahwa perempuan sering kali diposisikan sebagai "liyan" atau "yang lain" dalam masyarakat patriarkal. Beauvoir berpendapat bahwa peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pandangannya serupa dengan Kartini dalam hal mengkritisi peran tradisional yang mengekang perempuan, namun Beauvoir lebih menekankan analisis filosofis tentang bagaimana perempuan dipersepsikan dan diperlakukan dalam budaya Barat.

Germaine Greer, dalam bukunya "The Female Eunuch" (1970), menekankan pentingnya kebebasan seksual dan menolak pandangan bahwa perempuan harus menyesuaikan diri dengan standar keperempuanan yang ditetapkan oleh masyarakat. Greer mengkritik peran domestik tradisional dan mendorong perempuan untuk membebaskan diri dari ekspektasi sosial yang menindas. Pandangan Greer memiliki kesamaan dengan Kartini dalam hal menolak peran tradisional yang membatasi perempuan, namun Greer lebih fokus pada aspek kebebasan seksual sebagai bentuk pemberdayaan.

Judith Butler, seorang tokoh feminis postmodern, dalam bukunya "Gender Trouble" (1990), mengusulkan bahwa gender bukanlah identitas yang tetap atau kodrati, melainkan hasil dari tindakan performatif yang terus menerus dibentuk oleh norma-norma sosial. Butler berargumen bahwa feminisme harus mengkritisi dan menggugat konstruksi gender untuk membuka ruang bagi identitas yang lebih fleksibel dan inklusif. Meskipun Kartini tidak secara eksplisit membahas teori performatif, pemikirannya tentang pendidikan dan emansipasi perempuan menunjukkan pemahaman bahwa identitas perempuan tidak harus dibatasi oleh norma-norma tradisional.

Bell Hooks, dalam "Feminist Theory: From Margin to Center" (1984), menekankan pentingnya interseksionalitas dalam gerakan feminis. Hooks berargumen bahwa feminisme harus mempertimbangkan pengalaman perempuan yang berbeda berdasarkan ras, kelas, dan latar belakang sosial untuk benar-benar mencapai kesetaraan. Pandangan hooks tentang inklusivitas dan keadilan sosial memperluas gagasan Kartini tentang pendidikan dan kesetaraan menjadi perspektif yang lebih luas, yang mencakup berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang saling berinteraksi.

Dengan demikian, meskipun Kartini, Beauvoir, Greer, Butler, dan hooks berasal dari konteks yang berbeda, mereka semua berbagi visi tentang pentingnya membebaskan perempuan dari penindasan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Pandangan Kartini tentang pendidikan dan emansipasi perempuan di Indonesia memberikan kontribusi unik dalam wacana feminisme global, yang

memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang perjuangan kesetaraan gender.

Gagasan-gagasan Kartini dapat diterapkan dalam kerangka postmodernisme untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kompleks tentang perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Meski terpisah oleh waktu dan konteks budaya yang berbeda, pemikiran Kartini dan feminis postmodernis memiliki beberapa kesamaan. Keduanya menantang struktur patriarki dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan pribadi. Namun, pendekatan mereka sangat berbeda. Kartini lebih fokus pada solusi praktis untuk masalah konkret yang dihadapi perempuan pada zamannya, seperti pendidikan dan pernikahan paksa. Sementara itu, feminisme postmodern lebih bersifat teoretis, menekankan pentingnya dekonstruksi identitas dan keragaman pengalaman.

Postmodernisme, dengan penekanannya pada dekonstruksi dan relativisme, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konteks budaya dan sosial dimana penindasan gender terjadi. Dalam konteks ini, pemikiran Kartini dapat dilihat sebagai upaya untuk mendekonstruksi narasi besar tentang peran perempuan dalam masyarakat Jawa dan membuka ruang bagi identitas gender yang lebih *fluid* dan *inklusif*. Misalnya kritik Kartini terhadap peran tradisional perempuan dapat dipahami sebagai bentuk dekonstruksi terhadap esensialisme gender yang kaku.

Feminisme postmodern muncul sebagai respons terhadap keterbatasan feminisme gelombang kedua, yang sering dianggap terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah. Tokoh-tokoh seperti Judith Butler dan bell

hooks membawa konsep dekonstruksi dan pluralitas identitas ke dalam feminisme, menantang gagasan tentang identitas perempuan yang tunggal dan statis. Feminisme postmodern menolak metanarasi atau cerita besar yang mencoba menjelaskan pengalaman semua perempuan dengan cara yang sama, dan sebaliknya, menekankan keragaman dan kompleksitas identitas gender, ras, kelas, dan seksual.

Melalui lensa postmodernisme, perjuangan Kartini dapat dilihat sebagai bagian dari proyek yang lebih besar untuk menantang dan menggugat struktur kekuasaan yang mapan. Dengan menekankan pluralitas pengalaman dan identitas, pendekatan postmodernis terhadap pemikiran Kartini dapat membantu mengungkap berbagai bentuk penindasan yang dialami perempuan dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Ini memungkinkan kita untuk melihat perjuangan kesetaraan gender tidak hanya sebagai masalah universal, tetapi juga sebagai isu yang sangat kontekstual dan kompleks, memerlukan pendekatan yang beragam dan inklusif.

Penerapan gagasan Kartini dalam kerangka postmodernisme juga membuka peluang untuk dialog interseksional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelas, entitas, dan agama, kita dapat memahami bagaimana berbagai bentuk penindasan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Ini selaras dengan pandangan interseksionalitas dalam feminisme kontemporer yang menekankan pentingnya analisis multidimensi terhadap ketidakadilan gender. Dengan demikian, pemikiran Kartini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memahami dan mengatasi ketidakadilan

gender di Indonesia secara lebih menyeluruh dan mendalam.

Menggabungkan pemikiran Kartini dengan prinsip-prinsip feminisme postmodern dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dari Kartini, kita dapat mengambil semangat praktis untuk perubahan sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Dari feminisme postmodern, kita belajar pentingnya mengakui dan menghargai keragaman identitas dan pengalaman perempuan. Integrasi ini dapat menciptakan gerakan feminisme yang tidak hanya berakar pada tradisi dan kebutuhan lokal tetapi juga terbuka terhadap inovasi dan pemahaman teoretis baru.

Penting untuk melihat bagaimana pemikiran Kartini dan feminisme postmodern dapat diterapkan dalam konteks feminisme masa kini. Di satu sisi, isu-isu seperti kesetaraan upah, hak reproduksi, dan kekerasan berbasis gender tetap memerlukan pendekatan praktis dan kebijakan konkret, seperti yang diadvokasi oleh Kartini. Di sisi lain, semakin penting untuk memahami bagaimana identitas dan pengalaman perempuan saling berinteraksi dengan faktor-faktor seperti ras, kelas, dan orientasi seksual, sesuai dengan pandangan feminisme postmodern. Dengan demikian, feminisme masa kini harus mampu menggabungkan pendekatan praktis dan teoretis untuk menciptakan perubahan yang nyata dan inklusif.

Pendidikan untuk ibu. Bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan dimulai anak bersama air susu ibu. Alam sendiri lah yang menunjukkan dia untuk melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu dialah pendidik pertama anaknya. Di pangkuannya anak pertama

belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal pendidikan pertamanya bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia, yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagaimana sekarang, ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya, kalau perempuan dalam hal itu terbelakang.

Pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa, kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja; bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas, pikiran belumlah lagi jaminan orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti...” (Kartini, surat kepada Ny. Abedanon, 21 Januari 1901).

Dalam menelusuri evolusi pemikiran feminisme dari Kartini hingga era postmodernisme, kita melihat betapa pentingnya konteks sejarah dan budaya dalam membentuk perjuangan kesetaraan gender. Pemikiran Kartini yang menekankan pentingnya pendidikan dan emansipasi perempuan menjadi fondasi awal bagi gerakan feminis di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, gagasan-gagasan ini berkembang dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran feminis global. Setiap era dan setiap tokoh membawa perspektif baru, memperkaya dan memperluas wacana feminisme. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai aliran feminisme, kita dapat membangun pemahaman yang lebih kompleks dan inklusif tentang kesetaraan gender. Mengapresiasi kontribusi Kartini dalam konteks ini bukan hanya menghargai sejarah, tetapi juga menginspirasi langkah-

langkah ke depan dalam perjuangan yang terus berlanjut untuk keadilan dan kebebasan bagi semua perempuan.

D. KESIMPULAN

Kegelisahan Kartini mengenai ketidakberdayaan perempuan mencerminkan kritik tajam terhadap sistem sosial dan budaya yang mengekang kebebasan serta potensi perempuan, menjadikannya suara awal yang penting dalam perjuangan feminisme di Indonesia. Evolusi pemikiran feminisme dari Kartini ke postmodernisme menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam cara kita memahami dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini memberikan dasar yang kuat dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan praktis, sementara feminisme postmodern memperluas perspektif dengan menekankan keragaman identitas dan pengalaman. Integrasi kedua pendekatan ini dapat memperkaya gerakan feminisme, memastikan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender tetap relevan, inklusif, dan efektif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afida, S. H., Masykur, F., & Sholichah, I. U. (2023). Kedudukan Perempuan Dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme). *Tarbawi*, 6(1), 59-77.
- Azizah, L. (2020). *Konsep Pendidikan Kaum Feminis RA. Kartini dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Banet-Weiser, S., Gill, R., & Rottenberg, C. (2019). "Postfeminism, Popular Feminism and Neoliberal Feminism? Sarah Banet-Weiser, Rosalind Gill and Catherine Rottenberg in Conversation". *Feminist Theory*, 21(1), 3-24.
- Butler, J. (2011). "Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex". *Gender and Society*, 25(2), 139-160.
- Crenshaw, K. (1991). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color". *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
- Fraser, N. (2013). "Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis". *New Left Review*, 80, 97-117.
- Gill, R. (2017). "The Affective, Cultural and Psychic Life of Postfeminism: A Postfeminist Sensibility 10 Years On". *European Journal of Cultural Studies*, 20(6), 606-626.
- Hooks, b. (2015). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Routledge.
- Isnawati, R., & Isnaini, E. (2022). Feminisme Islam dalam Perspektif Raden Ajeng Kartini. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 4(1), 41-62.
- Mohanty, C. T. (2003). "Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles". *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(2), 499-535.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.

- Munro, E. (2013). "Feminism: A Fourth Wave?". *Political Insight*, 4(2), 22-25.
- Nash, J. C. (2008). "Re-thinking Intersectionality". *Feminist Review*, 89(1), 1-15.
- Puar, J. K. (2007). "Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times". *Social Text*, 25(2), 121-136.
- Rottenberg, C. (2018). "The Rise of Neoliberal Feminism". *Cultural Studies*, 32(2), 264-282.
- Sucipto, A. D. (2020). Wacana Feminisme dalam Catatan Najwa Spesial Hari Kartini. *Kalijaga Journal of Communication*, 2(2), 153-166.